

ABSTRAK

DPRD sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan kinerja pemerintah daerah dimaksudkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta kinerja bupati dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN. Kondisi pengawasan di Daerah Kabupaten Bombana nyaris tidak nampak. Mengenai kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Bombana hal ini terlihat pada saat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengeksekusi mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, Rustam Suspendy, Jumat (8/8/2014), di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Kendari. Melihat kasus yang telah disebutkan di atas maka begitu pentingnya pengawasan itu dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bombana terhadap pemerintah daerah, Maka penulis menganggap untuk menuis tesis “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kinerja pemerintahan daerah lama mewujudkan pemerintahan yang bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di Kabupaten Bombana”.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris (*socio-legal-research*). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian *non-doctrinal*, kajian empiris bersifat deskriptif dan mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD Kabupaten Bombana dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang pengadaan barang dan jasa dan pengawasan tentang kinerja pemerintah serta reses. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinue beberapa aspek sebagai berikut: 1) Pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan; 2) Pengawasan terhadap pengadministrasian; 3) Pengawasan terhadap pelaksana kegiatan pemerintahan; dan 4) Pengawasan pembentukan tata pemerintahan yang bersih dari KKN. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dikategorikan hambatan yang berasal dari anggota DPRD (faktor internal) maupun hambatan dari luar anggota DPRD (faktor eksternal). Hambatan faktor internal yaitu: pendidikan, pengalaman, kondisi sosial ekonomi, program kerja dan sekretariat. Hambatan faktor eksternal yaitu: perubahan peraturan perundang-undangan, rekrutmen partai politik dan partisipasi masyarakat. Dalam menjalankan pengawasan dengan baik DPRD perpedoman pada Tata Tertib DPRD Kabupaten Bombana selai itu melakukan langkah-langkah seperti: Sekretariat DPRD melakukan penyediaan tenaga ahli dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPRD, tenaga ahli dapat diambil dari perguruan tinggi yang sesuai dalam bidangnya, DPRD membuat jaringan kerjasama antara lembaga-lembaga yang melakukan pengawasan agar dapat melakukan pengawasan secara bersinergi serta membuat jadwal pelaksanaan kegiatan/tugas DPRD

Kata Kunci: Pengawasan, DPRD, Pemerintahan Daerah

ABSTRACT

Legislative Council as a regulatory agency that oversees regional and local government performance meant that the Legislative Council to supervise the performance of local regulations and make government regent clean and free from the practice of Corruption, Collusion and Nepotism. Regional monitoring conditions in Bombana barely visible. Regarding the cases of corruption that occurred in this case Bombana seen at the High Court of South East Sulawesi executed former Regional Secretary Bombana, Rustam Supendy, Friday (08/08/2014), in the Penitentiary Class IIA Kendari. Seeing the case mentioned above, so the importance of monitoring was conducted by the Regional Representatives Council Bombana against local government, then the author considers to menuis thesis "Oversight Legislative Council on the performance of local government net of Corruption, Collusion Nepotism in Bombana ".

Methods of approach in this study is empirical juridical (socio-legal-research). Juridical empirical research is the study of non-doctrinal, empirical studies are descriptive and has the object of study of the behavior of people who interact with the system arising from the existing norms.

Implementation of supervisory activities Legislative Council Bombana arranged in the form of hearings, working visits, formation of a special committee, the supervision of the management of goods and services, oversight of procurement and oversight of government performance and recess. In general it can be said that supervision by the Legislative Council conducted by the commission to review, study and continuously evaluate several aspects as follows: 1) Supervision of the legislation; 2) Supervision of the administration; 3) Supervision of the executive government activities; and 4) Monitoring the establishment of clean governance of Corruption, Collusion and Nepotism. Barriers in conducting oversight of local government performance can be categorized obstacles that come from members of the Regional Representatives Council (internal factors) as well as the resistance of the external members of the Regional Representatives Council (external factors). Barriers to internal factors, namely: education, experience, socio-economic conditions, the work program and the secretariat. Barriers external factors, namely: changes in legislation, recruitment and participation of political parties. In a well run surveillance Legislative Council Rules perpedoman at the Regional Representatives Council Bombana jam was taking steps such as: Secretariat of the House of Representatives did the provision of experts in order to support the smooth running of the duties and authority of Regional Representatives Council, experts can be taken from the corresponding college in the art, House of Representatives to create a network of cooperation between institutions that perform surveillance in order to conduct surveillance synergy and make the implementation schedule of activities/tasks Regional Representatives Council.

Keywords: Monitoring, Regional Representatives Council, Regional Government